

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik politik adalah proses-proses politik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan demi klaim atas kepemilikan properti atau posisi dan tempat yang mapan dalam struktur kekuasaan yang memunculkan ketegangan dan ketidakpuasan masyarakat hingga adanya tindakan anarkis dan kekerasan, munculnya kekerasan kolektif tadi tidak lain disebabkan oleh perubahan sosial yang terjadi ditengah masyarakat. Beberapa penelitian tentang konflik telah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu diantaranya, Dian Taufik Ramadhan, Arif Budimanta, Soemarno Witoro Soelarn.¹ Kemudian, Agus Lukman Hakim, Lala M Kolopaking, Hermanto Siregar, dan Eka Intan Kumala Putri². Dan yang terakhir Thomas, Agus Sikwan, Syf.Ema Rahmaniah³. Ketiga contoh penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang disebutkan diatas sangat unik dan menarik dalam menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi di masyarakat. Seperti halnya di tempat lain, konflik disebabkan karena berbagai perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam interaksi dan sering menimbulkan disintegrasi. Konflik bertentangan dengan integrasi, konflik dan

¹ Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus : Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol 12 (2) : 92-104, 2014 ISSN : 1829-8907

²Perebutan Sumber Daya Air : Analisis Konflik dan Politik Tata Ruang. Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017 hal 81-91 | 85.

³Konflik Sosial Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT.Borneo Ketapang Permai Dengan Masyarakat Desa Semayang Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2015

integrasi merupakan siklus dalam masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan Integrasi, tapi sebaliknya integrasi yang tidak sempurna menimbulkan konflik. Bentuk konflik yang terjadi bisa saja berupa konflik vertikal yaitu antara perusahaan (sektor swasta), pemerintah dan masyarakat, ataupun konflik horizontal yaitu yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, antara masyarakat yang pro dengan masyarakat yang kontra.

Jika dilihat dari kekurangan penelitian terdahulu, dimana peran dan kepentingan pemerintah kurang disorot dan dijelaskan, maka pada penelitian ini, peneliti ingin melihat faktor penyebab konflik politik tiga aktor tersebut diantaranya, masyarakat, swasta dan pemerintah dalam berkonflik serta peranan masing-masing kelompok tersebut. Konflik dapat diklasifikasikan kedalam bentuk dan jenis-jenis konflik menurut Soekanto, diantaranya : 1. Konflik pribadi, 2. konflik rasial (konflik budaya), 3. konflik antar kelas sosial (konflik sosial), 4. Konflik politik antar golongan dalam suatu masyarakat maupun antar negara yang berdaulat⁴. Uniknya konflik politik adalah karena melihat fenomena konflik dari setiap individu yang berkonflik membawa kepentingan kelompoknya masing-masing, dan menariknya penelitian yang akan peneliti lakukan adalah perlawanan masyarakat dilakukan oleh kaum perempuan di akhir gerakan. Konflik politik dalam pembangunan geothermal ini adalah karena dalam pembangunan geothermal melibatkan tiga aktor konflik, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, dimana pemerintah berkepentingan untuk mensukseskan program prioritas nasional, swasta demi profit atau keuntungan dan

⁴Thomas dkk *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2015* “Konflik Sosial Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT.Borneo Ketapang Permai Dengan Masyarakat Desa Semayang Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau” hal : 3

masyarakat demi mempertahankan tanah ulayatnya dan ketakutan akan dampak buruk yang diakibatkan tambang geothermal.

Berdasarkan hasil temuan tentang prioritas pembangunan nasional yang dikutip oleh peneliti dari sumber merdeka.com⁵, bahwa rencana kerja Pemerintah tahun 2018 telah memutuskan kebijakan yang terdiri dari 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas.⁶ Program ini menjadi upaya pemerintah dalam mempertajam penggunaan anggaran dan tepat sasaran. Untuk mensukseskan program pemerintah salah satunya dibidang ketahanan energi, pemerintah pusat kemudian melakukan pelelangan proyek pembangunan Geothermal salah satunya di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Dinamika politik lokal dimasa reformasi sekarang di atur didalam Undang-undang No.9 Tahun 2015 perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusannya, diantaranya DPRD Provinsi memiliki wewenang terhadap pemerintah

⁵Sumber: <https://www.merdeka.com/uang/ini-10-prioritas-pembangunan-nasional-pemerintahan-jokowi-di-2018.html> diakses pada tanggal 16 April 2018 pada pukul 19:00 wib.

⁶Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, 10 prioritas nasional tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energy, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah, serta politik, hukum, pertahanan dan keamanan, sementara 30 program prioritas meliputi : pendidikan vokasi, peningkatan kualitas guru, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan penanggulangan penyakit, preventif dan promotif (gerakan masyarakat hidup sehat), penyediaan perumahan layak, air bersih dan sanitasi, pengembangan 3 kawasan pariwisata, pengembangan 3 KI, pengembangan 3 KEK, perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi, EBT dan konservasi energi, pemenuhan kebutuhan energi, peningkatan produksi pangan, pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi), jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar, perluasan akses usaha (mikro, kecil, dan koperasi), pengembangan sarana dan prasarana transportasi, pengembangan telekomunikasi dan informatika, pembangunan wilayah perbatasan dan tertinggal, pembangunan perdesaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, reforma agraria, percepatan pembangunan Papua, penguatan pertahanan, stabilitas politik dan keamanan, kepastian hukum dan yang terakhir adalah reformasi birokrasi. Dari <http://ppid.bappenas.go.id/menteri-bambang-paparkan-10-prioritas-nasional-dan-30-program-prioritas/> diakses pada tanggal 09 juli 2018 pukul 19:00 wib.

daerah dimana yang terdapat pada pasal 101 poin 1 ayat (f) yang berbunyi, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana kerjasama internasional di daerah Provinsi, dan poin (g) yang berbunyi, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi.⁷ Artinya daerah berhak memutuskan untuk menyetujui atau menolak proyek pertambangan yang sudah disepakati oleh pusat dengan pihak asing. Namun, dalam prakteknya daerah masih dipandang sebelah mata, salah satu diantaranya adalah pembangunan geothermal. Pemerintah pusat tidak memperhatikan dampak yang terjadi akibat pembangunan tambang geothermal ini di daerah. Dampak ini misalnya muncul konflik politik yang berakibat pada benturan kepentingan antara pemerintah pusat dengan masyarakat, atau dampak demografis.

Untuk mengurangi resiko konflik dalam pembangunan harusnya pemerintah menggunakan pendekatan sistem komprehensif integral (utuh menyeluruh) dalam dinamika politik lokal misalkan seperti model ketahanan nasional, demografis, perekonomian, ideologi politik, sosial budaya, dan jika semua sudah diperhitungkan, maka yang terakhir tinggal menyimpulkan secara kualitatif apakah proyek tersebut layak dilakukan atau tidak. Adapun konflik yang terjadi dengan masyarakat, seharusnya pemerintah daerah memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan melibatkan masyarakat, setelah itu mengambil kebijakan terhadap kelanjutan pembangunan proyek tersebut, serta melakukan sosialisasi dalam pembangunan proyek geothermal itu, agar tidak terjadi konflik politik dan kendala

⁷sumber: <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-9-tahun-2015-57853> diakses pada tanggal 29 agustus 2018 pukul: 20:00 wib

yang didapati seperti di Nagari Salingka Gunung Talang ini. Dari konflik yang terjadi pada pembangunan Geothermal di Kabupaten Solok ini terdapat indikasi bahwa konflik yang ada adalah konflik politik diantaranya kepentingan yang dibawa oleh masing-masing kelompok (masyarakat, swasta, dan daerah). Masyarakat memperjuangkan agar pembangunan geothermal dihentikan dibuktikan dengan adanya aksi demonstrasi terhadap pembangunan geothermal tersebut. Kepentingan Swasta adalah memperoleh keuntungan dari adanya proyek setelah proyek geothermal berjalan sementara pemerintah berkepentingan mewujudkan kerjasama dengan swasta dan program yang sudah ada dalam 10 program prioritas nasional.

Adapun, Kecamatan yang terdapat di Salingka Gunung Talang ini adalah: pertama Kecamatan Kubung dengan 8 Nagari yaitu Nagari Gantuang Ciri, Gauang, Koto Baru, Koto Hilalang, Panyakalan, Salayo, Saok Laweh, dan Tanjuang Bingkuang, kemudian yang kedua Kecamatan Bukit Sundi dengan 5 Nagari diantaranya Nagari Bukik Tandang, Dilam, Kinari, Muaro Paneh, Parambahan, ketiga Kecamatan Payuang Sikaki yang memiliki 3 Nagari yaitu Nagari Sirukam, Supayang dan Aie Luo, keempat Kecamatan Lembang Jaya dengan 6 Nagari yaitu Nagari Koto Anau, Batu Banyak, Limau Lunggo, Koto Laweh, Salayo Tanang Bukik Sileh, dan Batu Bajanjang, kelima Kecamatan Gunung Talang dengan 8 Nagari yaitu Nagari Cupak, Talang, Sungai Janiah, Koto Gadang Guguak, Koto Gaek Guguak, Jawi-Jawi Guguak, Batang Barus dan Aia Batumbuak.

1.2 Rumusan Masalah

Persoalan pembangunan geothermal ini berawal dari adanya Berita Acara Hasil Pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Talang – Bukit Kili Nomor BA-10/10.10/WKP-4/KESDM/2016 tanggal 22 September 2016, ditetapkan bahwa peringkat pertama dari pelelangan WKP Gunung Talang–Bukit Kili adalah Konsorsium PT Hitay Daya Energy dan PT Dyfco Energy, Alamat : The Plaza Office Tower, Lt.41, Jl. MH. Thamrin Kav 38-40, Jakarta, Penawaran Harga Tenaga Listrik : 12,75 sen US\$/kWh⁸. PT Hitay Daya Energy menang pada tahun 2016, maka mulailah dibuat pembangunan tambang.

Menangnya konsorsium PT Hitay Daya Energi ini akan menguntungkan Negara Indonesia lewat program ketahanan energi. Dimana Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 29.000 MW sangat erat kaitannya dengan posisi Indonesia dalam kerangka tektonik dunia⁹. Energi panas bumi yang tersebar inilah yang di bangun oleh Indonesia dalam proyek pembangunan Geothermal salah satunya di Gunung Talang. Ternyata, pembangunan ini mendapat penolakan dari masyarakat yang cemas dengan keringnya pasokan air untuk sawah-sawah mereka, karena masyarakat yang tinggal di sekitaran Gunung Talang umumnya bermata pencarian bertani.¹⁰

⁸Sumber:<http://www.ebtke.esdm.go.id/post/2016/10/21/1389/pengumuman.pemenang.pelelangan.wilayah.kerja.panas.bumi.gunung.talang.-bukit.kili> diakses pada tanggal 18 April 2108 pukul 20:00 wib

⁹Maksud peneliti tentang 29.000 MW dan kaitan erat posisi Indonesia dalam kerangka tektonik dunia adalah posisi strategis yang didapatkan Indonesia dan menempatkan Indonesia sebagai Negara terkaya dengan energy panas bumi, yang tersebar di sepanjang rangkaian vulkanik. Energy panas bumi tidak bisa di ekspor namun, menguntungkan untuk pemenuhan kebutuhan energy dalam negeri.Rujuk :<https://berandainovasi.com/energi-panas-bumi-untuk-ketahanan-energi-nasional/>

¹⁰<http://www.mentawaikita.com/berita/1402/nestapa-petani-salingka-gunung-talang-dalam-konflik-geothermal-solok.html> di akses pada tanggal 08 juli 2018 pukul 18:00 WIB

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PT Hitay terjadi karena penolakan-penolakan yang dilakukan masyarakat, sementara pembangunan itu juga merupakan program ketahanan energi dari pemerintah. Penolakan masyarakat pun dikarenakan oleh ketidakpahaman masyarakat terhadap proyek geothermal tersebut, masyarakat takut apabila dilakukan pengeboran untuk mencari sumber panas bumi akan berdampak buruk pada hilangnya sumber air bagi sawah-sawah petani¹¹. Aksi penolakan yang dilakukan warga dalam bentuk aksi demonstrasi didapatkan peneliti dari media tercatat sebanyak enam kali. Pertama, pada tanggal 13 September 2017 dengan tuntutan menolak proyek Geothermal, orator pun memberikan ancaman jika tuntutannya tidak dipenuhi.¹² Kedua, Aksi lanjutan pada tanggal 2 Oktober 2018 yang berujung ricuh karena masyarakat memaksa masuk ke dalam kompleks kantor Bupati dan langsung dihadang personel gabungan.¹³ Kemudian yang ketiga massa yang terlibat aksi-aksi demonstrasi mulai bertindak anarkis seperti pada saat aksi yang terjadi ada tanggal 20 November 2017 di mana terjadi penyanderaan pihak perusahaan oleh warga hingga pembakaran mobil milik perusahaan.¹⁴ Keempat, Aksi demonstrasi ini dilakukan pada tanggal 21 Maret 2018 dengan masih memperjuangkan penolakan terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga



¹¹lokasi rencana pengeboran yang dinamai Blok Gunung Talang-Bukit Kili tersebut diprotes warga dengan berdemonstrasi, meskipun saat ini proses pengeboran belum berlangsung dan masih dalam tahap sosialisasi. “Setahu kami sudah tiga kali dilakukan sosialisasi, namun tidak ada titik temu. Hal ini terkait dampak lingkungan dan kerusakan lahan pertanian masyarakat yang ditimbulkan jika pengeboran ini dilakukan,” ungkap salah satu warga Batu Bajanjang, Rabu (13/7) yang meminta namanya tidak di post media ini Arta News.com/20 juli 2017

¹²<https://minangkabaunews.com/artikel-13905-ribuan-masyarakat-salingka-gunung-talang-solok-demo-tolak-proyek-panas-bumi.html> diakses pada tanggal 27 Agustus 2018 pukul 19:00 wib

¹³<https://sumbartime.com/aksi-demo-tolak-geothermal-sempat-ricuh-ribuan-warga-serbu-kantor-bupati-solok/> diakses pada tanggal 27 Agustus 2018 pukul 19:20 wib

¹⁴<https://www.harianhaluan.com/news/detail/67649/warga-salingka-gunung-talang-mengamuk-karyawan-pt-hitay-daya-energi-disandera-mobilnya-dibakar> diakses pada tanggal 20 agustus 2018 pukul 21:00 wib

Panas Bumi di Kabupaten Solok tersebut, sangat disayangkan karena aksi kali ini berujung pada tindak kekerasan yaitu pelemparan batu yang mengakibatkan tiga orang personel kepolisian luka-luka.¹⁵ Hingga terakhir putusan pengadilan pada tanggal 24 Juli 2018 yang menuntut terdakwa pembakar mobil survey selama 7 tahun penjara.¹⁶ Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (disingkat PLTP) ini sebenarnya bukan yang pertama di Indonesia, melainkan 13 PLTP yang sudah beroperasi dan terpasang berdasarkan letak geografis dari wilayah barat sampai wilayah timur Indonesia adapun sebagai berikut: 1. PLTP Sibayak, wilayah kerja: Sibayak, Sinabung, Sumatera Utara, 2. PLTP Sarulla, wilayah kerja: Sibual-buali, Sumatera Utara, 3. PLTP Ulubelu, wilayah kerja: Waypanas, Lampung, 4. PLTP Salak, wilayah kerja: Cibeureum Parabakti, Jawa Barat, 5. PLTP Wayang Windu, wilayah kerja: Pangalengan, Jawa Barat, 6. PLTP Patuha, wilayah kerja: Pangalengan, Jawa Barat, 7. PLTP Kamojang, wilayah kerja: Kamojang-Darajat, Jawa Barat, 8. PLTP Darajat, wilayah kerja: Kamojang-Darajat, Jawa Barat, 9. PLTP Dieng, wilayah kerja: Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah, 10. PLTP Karaha, wilayah kerja: Karaha Bodas, Jawa Barat, 11. PLTP Matalako, wilayah kerja: Matalako, Nusa Tenggara Timur, 12. PLTP Ulumbu, wilayah kerja: Ulumbu, Nusa Tenggara Timur, 13. PLTP Lahendong, wilayah kerja: Lahendong Tompas, Sulawesi Utara. Berbeda dengan 13 PLTP lain yang tersebar di seluruh Indonesia, PLTP yang akan dibangun di Sumbar mendapat



¹⁵<https://www.merdeka.com/peristiwa/demo-tolak-geothermal-di-solok-3-polisi-luka-luka.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 21:15 wib

¹⁶<https://www.harianhaluan.com/news/detail/70945/ratusan-warga-hadiri-sidang-putusan%20A0-kasus-geothermal-pengawasan-diperketat> diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 22:00 wib

penolakan dari masyarakat, mulai dari demonstrasi, sampai berujung pada tindakan anarkis dan kekerasan.

Pasca adanya aksi demo yang dilakukan masyarakat salingka Gunung Talang, tepatnya di Nagari Batu Bajanjang beberapa waktu lalu, agenda pemanfaatan energi panas bumi di Kabupaten Solok makin menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok, yang merupakan perwakilan masyarakat di parlemen, mengaku akan memanggil PT Hitay Daya Energi selaku pemenang tender mega proyek ini. Kekawatiran masyarakat akan dampak lingkungan inilah yang menjadi pemicu timbulnya perpecahan di Nagari Batu Bajanjang. Seperti yang disampaikan beberapa masyarakat kepada sumbartoday.com beberapa waktu lalu di Nagari Batubajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok.¹⁷

Pada senin (20/11/17) Perwakilan PT Hitay Daya Energy datang ke Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok yang akan dijadikan lokasi eksplorasi dan eksploitasi energi panas bumi tersebut tanpa pemberitahuan, dan mendapat respon negatif dari warga, hingga terjadi pembakaran mobil milik PT Hitay oleh warga yang geram. Seperti yang disampaikan oleh beberapa masyarakat ke sumbartoday.com. “mereka datang tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat disini. Ini kampung kami, jangan datang seenaknya, seakan nagari kami tak

¹⁷Menyikapi gejolak di masyarakat, pada hari Sabtu (16/9/17) diadakan dialog akademisi inisiasi Pascasarjana Universitas Andalas. Dialog dihadiri kepala dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumbar, ketua Asosiasi Geothermal Indonesia, Direktur WALHI Sumatera Barat dan perwakilan dari masyarakat Solok. Ardinis Arbain, Dosen Biologi Lingkungan Universitas Andalas mengatakan, geothermal bukanlah energy yang benar-benar bersih. Banyak riset geothermal di Itali dan Selandia Baru menemukan, energy ini menghasilkan gas buang karbondioksida dan metan dalam jumlah besar.

berpenguji. Hargai kami disini, datanglah seperti tamu, jangan seperti maling yang masuk diam-diam” ungkap mereka.¹⁸ Setelah kejadian pembakaran mobil oleh warga tersebut, pihak kepolisian mengurut peristiwa pembakaran itu. Tapi proses yang berjalan diduga tidak benar-benar objektif untuk penegakan hukum. Orang-orang yang disasar justru tidak terkait pembakaran mobil melainkan lebih ke tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap bergerak melakukan penolakan, satu orang diantaranya ditangkap diam-diam pukul 02:00 dini hari tanggal 29 Desember 2017 oleh tim dari kepolisian Daerah Sumatera Barat, yang didampingi oleh Wali Nagari setempat, dan malam itu juga langsung di BAP dan ditahan. Sementara 6 orang lainnya langsung di DPO.¹⁹

Aksi warga terus berlanjut sampai aliansi masyarakat Salingka Gunung Talang melakukan demonstrasi dengan cara berjalan kaki dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sumatera Barat ke Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat. Warga menuntut pembebasan para warga yang ditahan dan mengajukan permohonan pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Padang, terkait konflik dengan PT HDE. Aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat dilihat menarik oleh peneliti, yaitu dengan mayoritas massa aksi adalah kaum perempuan (ibu-ibu) seperti yang terjadi pada tanggal 21 maret 2018 hingga terjadi pelemparan batu oleh

¹⁸Sumber: <https://www.sumbartoday.com/datang-tanpa-pemberitahuan-mobil-perwakilan-pt-hitay-daya-energy-dibakar-masa/> diakses pada tanggal 16 agustus 2018 pukul: 00:25 wib

¹⁹Sumber: <https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/5a5f72b6dd0fa82e5c1dae62/konflik-sda-warga-gunung-talang-terancam-kekerasan-dan-kriminalisasi-aparat> diakses pada tanggal 16 agustus 2018 pukul: 00:40 wib

masyarakat.²⁰ Lazimnya keterlibatan perempuan dalam aksi konfrontasi berhadapan langsung dengan pemerintah jarang terjadi. Namun, konflik yang terjadi di Bukik Sileh ini dilakukan oleh mayoritas perempuan, di dalam aksi demonstrasi yang dilakukan, perempuan juga mendapat perlakuan kasar saat baku pukul dengan aparat pemerintah serta kepolisian.²¹ Itulah kronologis konflik yang terjadi dimana kepentingan pemerintah berbenturan dengan masyarakat dan mengakibatkan PT Hitay tidak bisa beroperasi guna mensukseskan program ketahanan energi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas maka, ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menyebabkan konflik politik antara Masyarakat Salingka Gunung Talang dengan PT.Hitay Daya Energy dan Pemerintah dalam pembangunan Geothermal di Kabupaten Solok.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penyebab konflik politik antara Masyarakat dengan PT.Hitay Daya Energy dan Pemerintah dalam pembangunan Geothermal, Kabupaten Solok.
2. Untuk menjelaskan aktor dan perannya dalam konflik politik antara masyarakat dengan PT.Hitay Daya Energy dan Pemerintah dalam pembangunan Geothermal di Kabupaten Solok.

²⁰Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/demo-tolak-geothermal-di-solok-3-polisi-luka-luka.html> di akses pada 16 Agustus 2018 pukul 01:10 wib

²¹Sumber: <http://www.mentawaikita.com/berita/1402/nestapa-petani-salingka-gunung-talang-dalam-konflik-geothermal-solok.html> diakses pada tanggal 16 agustus 2018 pada pukul: 01:27 wib

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah khasanah keilmuan dibidang politik khususnya yang membahas mengenai konflik politik di dalam masyarakat. Dan penelitian ini, dapat menjadi inspirasi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang membahas masalah mengenai konflik politik yang terjadi didalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pembangunan di suatu daerah.

2. Secara praktis dapat memberikan gambaran, pemahaman kepada masyarakat dan pengambil kebijakan di tingkat Kabupaten khususnya mengenai pertambangan, dan sebagai informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

